

# TESIS

## KEWENANGAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PPAT DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor:20/G/2020/PTUN/PBR)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh

**INDA FEBRI RAHAYU S**

**2020123064**



**Dosen Pembimbing :**

**1. PROF. DR. ZAINUL DAULAY, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

**KEWENANGAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH  
PPAT DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(Studi Kasus Putusan Nomor:20/G/2020/PTUN/PBR)**

**ABSTRAK**

Dalam menjalankan tugas dan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan selalu terkait lingkup pengawasan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD). Pengaturannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara moril MPPD sering dimintai bantuan oleh praktisi-praktisi hukum dalam pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Salah satunya yaitu dengan pemberian sanksi terhadap PPAT. Penelitian ini terkait dengan sanksi yang diberikan oleh MPPD pada seorang PPAT Kabupaten Rokan Hulu dengan sanksi pemberhentian tidak hormat yang kemudian digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN/PBR. PPAT yang bersangkutan tidak menerima putusan dari MPPD tersebut, karena dianggap MPPD tidak dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukannya dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni 1) Bagaimanakah kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam memberikan sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah?; 2) Apakah Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam pemberian sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diuji dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang dilakukan dengan deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa : 1) Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun demikian sebelum sanksi tersebut diberikan dilakukan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu oleh MPPD. Selanjutnya, MPPD dapat melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dilaksanakan mulai dari tingkat Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) jika terbukti adanya pelanggaran yang telah dilakukan PPAT. 2) Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam memberikan sanksi terhadap PPAT dapat diuji dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai Badan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang merupakan jabatan Tata Usaha Negara, MPPD tentu merupakan Badan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci : Kewenangan, Majelis Pembina dan Pengawas, Sanksi PPAT**

**THE AUTHORITY OF THE REGIONAL PPAT CONSTRUCTION  
ASSEMBLY AND SUPERVISORY IN GIVING SANCTIONS AGAINST  
LAND DEED OFFICIALS**

**(Case Study Decision Number: 20/G/2020/PTUN/PBR)**

**ABSTRACT**

*In carrying out the duties and positions of the Land Deed Officials (PPAT), it will always be related to the scope of supervision of the Regional Supervisory and Supervisory Council (MPPD). The arrangement is based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning /Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 concerning the Guidance and Supervision of Land Deed Officials. Morally MPPD is often asked for assistance by legal practitioners in the development and supervision of PPAT. One of them is by imposing sanctions on PPAT. This research is related to the sanctions given by the MPPD to a PPAT in Rokan Hulu Regency with a dishonorable dismissal which was later sued at the State Administrative Court in the decision Number: 20/G/2020/PTUN/PBR. The PPAT concerned does not accept the decision from the MPPD, because it is considered that the MPPD cannot prove the violation he has committed and is not in accordance with applicable procedures. The problems raised in this study, namely 1) What is the authority of the Regional Supervisory and Supervisory Council (MPPD) in giving sanctions Land Deed Officials?; 2) Can the decree of the Regional Supervisory and Supervisory Council (MPPD) in imposing sanctions on Land Deed Officials be considered in the State Administrative Court (PTUN)? This type of research uses a empirical juridical approach, using primary data, secondary data and tertiary data. Data analysis was carried out with a descriptive. The results of the study explain that: 1) The Regional Supervisory and Supervisory Council (MPPD) has the authority to sanction land deed officials (PPAT), however, before the sanctions are given, guidance and supervision are carried out first by the MPPD. Furthermore, MPPD can conduct an examination of alleged violations committed by PPAT starting from the level of the Regional Supervisory and Supervisory Council (MPPD) if it is proven that there are violations that have been committed by PPAT. 2) The decision issued by the Regional Supervisory and Supervisory Council (MPPD) in sanctioning PPAT can be tested in the State Administrative Court. As an agency that gets an overflow of authority from the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning /Head of the National Land Agency which is a State Administrative position, MPPD is certainly a State Administrative Entity.*

**Keywords: Authority, Supervisory and Supervisory Council, PPAT Sanction**